

INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI

PROVINSI SULAWESI TENGGARA 2021



INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI

PROVINSI SULAWESI TENGGARA 2021





INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2021

ISBN : -
No. publikasi : 74000.2209
Katalog BPS : 7102025.74
Ukuran buku : 21 x 29 cm
Jumlah halaman : xii + 40 halaman

Naskah:

BPS Provinsi Sulawesi Tenggara

Penyunting:

BPS Provinsi Sulawesi Tenggara

Gambar Kulit:

BPS Provinsi Sulawesi Tenggara

Ilustrasi:

Freepik.com, Flaticon.com

Diterbitkan Oleh:

© Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara

Dicetak Oleh:

UD. Rezky Bersama

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari BPS Provinsi Sulawesi Tenggara

KATA PENGANTAR

Publikasi Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2021 merupakan publikasi tahun kedua yang diterbitkan oleh BPS Provinsi Sulawesi Tenggara yang berisi tentang data Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi dan seluruh kabupaten/kota se-Provinsi Sulawesi Tenggara. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) merupakan indeks yang menggambarkan tingkat kemahalan harga barang dan jasa konstruksi suatu kabupaten/kota dibandingkan kota acuan.

Data IKK diperoleh dari hasil Survei Harga Kemahalan Konstruksi khusus bahan bangunan atau konstruksi, sewa alat berat, dan upah jasa konstruksi yang dilaksanakan di seluruh Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara.

Data IKK merupakan salah satu komponen yang digunakan dalam perumusan Dana Alokasi Umum (DAU) di samping jumlah penduduk, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), luas wilayah, dan Angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita. Publikasi ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran perkembangan data IKK di Provinsi Sulawesi Tenggara dan kabupaten/kota se-Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2017–2021. Kepada semua pihak yang telah membantu penerbitan publikasi ini, kami sampaikan ucapan terima kasih.



Kendari, Maret 2022
Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Sulawesi Tenggara

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Agnes Widiastuti'.

Agnes Widiastuti, S.Si, ME.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
1. Pendahuluan.....	1
1.1. Latar Belakang	3
1.2. Tujuan	3
1.3. Cakupan	4
1.4. Konsep dan Definisi	4
2. Metodologi	7
2.1. Indeks Kemahalan Konstruksi	9
2.2. Paket Komoditas	10
2.3. Diagram Timbang IKK	11
2.4. Dana Alokasi Umum	11
2.5. Formula Penghitungan Indeks Kemahalan Konstruksi.....	12
2.6. IKK 2020	14
3. Ulasan Singkat.....	15
3.1. Gambaran Umum Provinsi Sulawesi Tenggara.....	18
3.2. Kondisi Transportasi	19
3.3. Dana Alokasi Umum Provinsi Sulawesi Tenggara.....	21
3.4. Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi Sulawesi Tenggara	22
3.5. Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten/Kota	25
Lampiran	29

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1.	Panjang Jalan Dirinci Menurut Kabupaten/Kota dan Tingkat Kewenangan Pemerintahan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Km), 2021	20
Tabel 3.2.	Panjang Jalan menurut Kondisi Jalan dan Tingkat Pemerintah yang Berwenang di Sulawesi Tenggara (Km), 2021	21
Tabel 3.3.	Rencana Dana Alokasi Umum (DAU) Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara (Ribu Rupiah), 2021	22
Tabel 3.4.	Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tenggara, 2021	26

<https://sultra.bps.go.id>

DAFTAR GAMBAR

Ulasan Singkat

Gambar 1.	Luas Daerah menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara (%), 2021	19
Gambar 2.	Indeks Kemahalan Konstruksi Menurut Provinsi, 2021	23
Gambar 3.	Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi Kawasan Sulampua, 2021	24
Gambar 4.	Peringkat Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi Sulawesi Tenggara pada Level Nasional, 2017-2021	25
Gambar 5.	Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tenggara, 2021	27
Gambar 6.	Indeks Kemahalan Konstruksi dan Dana Alokasi Umum Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara, 2021	28

DAFTAR LAMPIRAN

Tabel 1. Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi, 2017 (Kota Surabaya = 100).....	31
Tabel 2. Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi, 2018 (Kota Semarang = 100).....	32
Tabel 3. Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi, 2019 (Kota Semarang = 100).....	33
Tabel 4. Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi, 2020 (Kota Semarang = 100).....	34
Tabel 5. Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi, 2021 (Kota Makassar = 100).....	35
Tabel 6. Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tenggara, 2017 (Kota Surabaya = 100)	36
Tabel 7. Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tenggara, 2018 (Kota Semarang = 100)	37
Tabel 8. Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tenggara, 2019 (Kota Semarang = 100)	38
Tabel 9. Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tenggara, 2020 (Kota Semarang = 100)	39
Tabel 10. Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tenggara, 2021 (Kota Makassar = 100)	40

— PENDAHULUAN —



1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejak diundangkannya kebijakan otonomi daerah (Otonomi Daerah) pada tahun 2000, pemerintah daerah diarahkan untuk mendorong percepatan dan pemerataan pembangunan di wilayahnya masing-masing. Dengan penerapan kebijakan ini diharapkan tujuan nasional yakni meningkatkan kesejahteraan rakyat dapat tercapai secara efektif dan efisien. Tujuan lain dari kebijakan Otonomi Daerah adalah pemerataan kemampuan keuangan antar daerah sehingga ketimpangan antar daerah dapat teratasi. Pemerintah daerah terutama yang masih tertinggal diharapkan mampu mengelola keuangan daerah dan memanfaatkan sumber daya alam yang terdapat di daerahnya sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat. Kebijakan Otonomi Daerah yang dikeluarkan pemerintah sejak tanggal 1 Januari 2001 dilandasi oleh Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014, setiap Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk mendayagunakan potensi keuangan daerah sendiri dan perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang berupa Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). DAU merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah. Azas kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) yang mendasari penghitungan DAU diduga memerlukan dukungan data yang valid, akurat, dan terkini dengan harapan pembagian DAU ke daerah menjadi lebih adil, proporsional dan merata. Dalam formulasi DAU, salah satu variabel yang dibutuhkan adalah Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten/Kota.

Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan penghitungan IKK sejak tahun 2002 untuk keperluan penghitungan DAU 2003 yang kemudian dilanjutkan hingga sekarang. Data IKK tersebut ditujukan untuk melihat tingkat perbandingan harga barang/jasa konstruksi antarwilayah dibandingkan dengan harga barang/jasa konstruksi suatu kota acuan. Menurut World Bank, Indonesia sebagai negara kepulauan dengan kondisi geografis yang relatif beragam dan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, infrastruktur diduga memegang peranan dalam penentuan harga konstruksi di Indonesia. Semakin sulit letak geografis suatu daerah maka diduga semakin tinggi pula tingkat harga konstruksi di daerah tersebut.

1.2. Tujuan

Penyajian Publikasi Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2021 bertujuan untuk memberikan informasi terkait data tingkat kemahalan konstruksi seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tenggara dan perbandingan tingkat kemahalan konstruksi Provinsi Sulawesi Tenggara dengan provinsi lainnya di Indonesia.

Publikasi Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi Sulawesi Tenggara, diharapkan dapat memberikan informasi kepada para pengguna data, baik dari instansi pemerintah maupun swasta. Data tersebut sekaligus juga dapat digunakan sebagai masukan bagi perencanaan di Sulawesi Tenggara untuk masa mendatang.

1.3. Cakupan

Data yang disajikan dalam publikasi ini merupakan hasil pengolahan dan penghitungan Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi Sulawesi Tenggara dan seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2017–2021.

1.4. Konsep dan Definisi

Beberapa konsep dan definisi umum yang digunakan dalam proses pengumpulan data dan penghitungan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) antara lain: konsep mengenai harga barang konstruksi termasuk harga sewa alat berat, pedagang besar, pedagang campuran, kegiatan konstruksi, tingkat kemahalan konstruksi, diagram timbang, dan indeks kemahalan konstruksi.

Indeks Kemahalan Konstruksi didefinisikan sebagai:

Suatu indeks yang menggambarkan tingkat perbandingan harga barang/jasa konstruksi antar wilayah dibandingkan dengan harga barang/jasa konstruksi suatu kota acuan.

Bahan bangunan atau konstruksi didefinisikan sebagai:

Bahan bangunan atau konstruksi didefinisikan sebagai material yang digunakan dalam pembentukan komponen bangunan dan ditempatkan pada bagian suatu bangunan atau konstruksi yang merupakan satu kesatuan dari bangunan tersebut.

Kegiatan Konstruksi didefinisikan sebagai:

Suatu kegiatan meliputi perencanaan, persiapan, pembuatan, pembongkaran, dan perbaikan bangunan yang hasil akhirnya berupa bangunan atau konstruksi yang menyatu dengan lahan tempat kedudukannya baik digunakan sebagai tempat tinggal atau sarana kegiatan lainnya. Kegiatan konstruksi yang dicatat dalam penghitungan IKK hanya kegiatan investasi (pembangunan baru, bukan renovasi yang tidak menambah nilai aset). Hasil kegiatan konstruksi antara lain: gedung, jalan, jembatan, terowongan, bangunan air dan drainase, bangunan sanitasi, landasan pesawat terbang, dermaga, bangunan pembangkit listrik, transmisi, serta distribusi dan bangunan jaringan komunikasi.

Sewa Alat Berat didefinisikan sebagai:

Harga yang terjadi ketika seseorang/organisasi/institusi menyewa alat berat yang digunakan untuk kegiatan konstruksi dalam periode tertentu. Satuan/unit yang digunakan dalam harga sewa ini merupakan sewa selama 1 bulan atau 200 jam. Harga sewa hanya biaya sewa alat, tidak termasuk biaya mobilisasi alat dari penyewa ke lokasi proyek, dan juga tidak termasuk biaya jasa operator. Umur alat berat yang disewakan juga memiliki syarat batas umur maksimal 8 tahun.

Upah didefinisikan sebagai:

Uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu. Dalam kegiatan konstruksi, upah jasa konstruksi meliputi upah mandor, kepala tukang, tukang, pembantu tukang. Satuan/unit yang digunakan dalam upah jasa ini adalah satu orang/hari.

Tingkat Kemahalan Konstruksi (TKK) didefinisikan sebagai:

Cerminan dari suatu nilai bangunan/konstruksi yang akan dibandingkan antar daerah, yaitu besarnya biaya yang dibutuhkan untuk membangun 1 (satu) unit bangunan per satuan ukuran luas di suatu kabupaten/kota atau provinsi yang diukur melalui sekelompok barang dan jasa yang digunakan.

Paket komoditas didefinisikan sebagai:

Sejumlah barang terpilih yang digunakan sebagai komponen penghitungan IKK. Komoditas/jenis barang tersebut dipilih karena memenuhi asas *representativeness* dan *comparability* yaitu andil yang cukup besar dan data harganya dapat dipantau dan mempunyai tingkat keterbandingan antar kabupaten/kota. Paket komoditas disebut juga sebagai kualitas nasional.

Kualitas provinsi didefinisikan sebagai:

Kualitas yang dominan disuatu provinsi tetapi tidak dominan bila ditinjau secara nasional. Kualitas provinsi digunakan sebagai dasar konversi kedalam kualitas nasional untuk kualitas nasional yang memang tidak terdapat di provinsi tersebut.

Diagram Timbang didefinisikan sebagai:

Bobot yang digunakan dalam penghitungan IKK terdiri dari diagram timbang IKK menurut kelompok jenis bangunan (3 kelompok) dan diagram timbang Umum. Diagram timbang kelompok jenis bangunan adalah bobot setiap jenis barang dan jasa dalam memperoleh nilai TKK masing-masing kelompok jenis bangunan. Diagram timbang umum adalah bobot setiap jenis bangunan dalam memperoleh IKK umum setelah diperoleh IKK masing-masing kelompok jenis bangunan.

Harga perdagangan besar (HPB) didefinisikan sebagai:

Harga transaksi yang terjadi antara pedagang besar pertama sebagai penjual dengan pedagang besar berikutnya sebagai pembeli secara *party/grosir* di pasar pertama atas suatu barang.

HPB bahan bangunan/konstruksi didefinisikan sebagai:

Harga berbagai jenis bahan bangunan yang digunakan dalam kegiatan konstruksi dalam jumlah besar (*party*) yang merupakan hasil transaksi antara pedagang besar/distributor/supplier bahan bangunan/konstruksi dengan pengguna bahan bangunan tersebut.

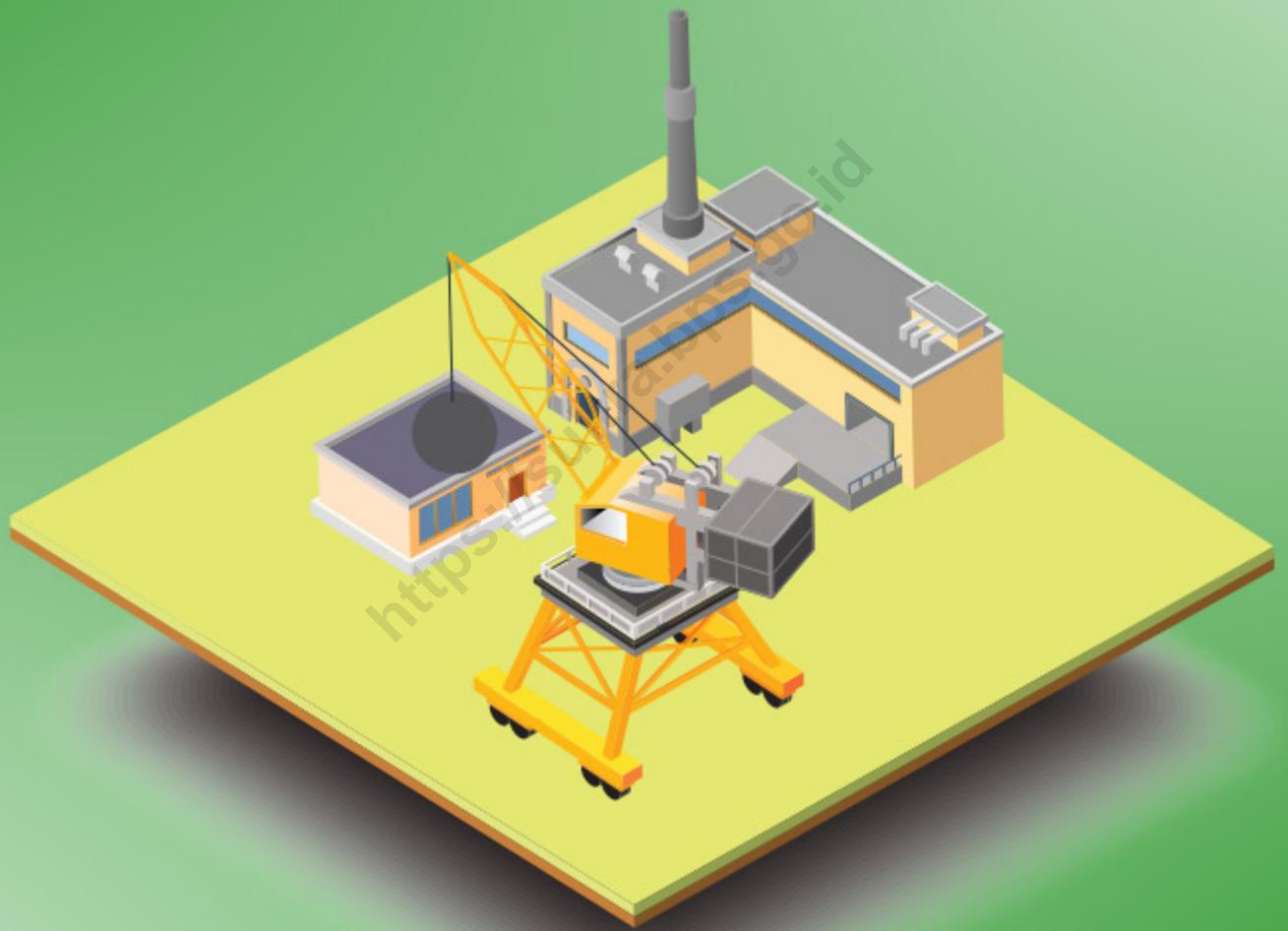
Pedagang besar (PB) didefinisikan sebagai:

Pedagang/distributor yang menjual bahan bangunan/konstruksi secara *party/grosir* atau dalam jumlah besar.

Pedagang campuran didefinisikan sebagai:

Pedagang yang dapat menjual barang dagangannya dalam jumlah besar maupun eceran. Grosir atau jumlah besar yang dimaksud adalah bukan eceran. Batasan ini relatif, mengingat sulit menentukan besarnya, baik kuantitas maupun nilai dari suatu komoditas. Hal ini sangat tergantung dari karakteristik komoditasnya sendiri

— METODOLOGI —



2. METODOLOGI

2.1. Indeks Kemahalan Konstruksi

Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) merupakan angka indeks yang menunjukkan perbandingan harga bahan bangunan atau jasa konstruksi antar lokasi yang berbeda pada periode yang sama dibandingkan dengan suatu kota acuan. Lebih lanjut, IKK merupakan cerminan dari suatu nilai bangunan atau konstruksi atau biaya yang dibutuhkan untuk membangun 1 (satu) unit bangunan per satuan ukuran luas di suatu kabupaten/kota atau provinsi.

Untuk tujuan membandingkan harga konstruksi antar wilayah/daerah, dikenal dua metode penghitungan, yang pertama dengan pendekatan harga input dan yang kedua dengan pendekatan harga output. Pendekatan harga input yaitu dengan mencatat semua material penting yang digunakan, digabung dengan upah dan sewa peralatan sesuai dengan bobotnya masing-masing. Kelemahan metode ini bahwa kegiatan konstruksi dianggap mempunyai produktivitas yang sama dan tidak mempertimbangkan *overhead cost*. Disisi lain, pendekatan output dilakukan dengan cara menanyakan harga konstruksi yang sudah jadi. Namun, terdapat kelemahan pada pendekatan ini yaitu dalam harga bangunan sudah termasuk biaya manajemen dan keuntungan kontraktor yang bervariasi antar daerah dan antar proyek sehingga kurang sesuai untuk tujuan membandingkan kemahalan konstruksi antar wilayah. Dengan pertimbangan ini, disepakati penghitungan IKK menggunakan pendekatan harga input.

Dalam penghitungan IKK diperlukan data/komponen penunjang yaitu paket komoditas, diagram timbang, dan data harga jenis bahan bangunan yang menjadi paket komoditas penghitungan IKK. Selain itu, ditetapkan pula suatu kabupaten/kota sebagai acuan dalam penghitungan indeksnya.

Penentuan kota acuan dalam penghitungan IKK dilakukan dengan menentukan salah satu kabupaten/kota yang memiliki nilai IKK mendekati angka rata-rata seluruh kabupaten/kota se-Indonesia. Pertimbangan penggunaan salah satu ibukota provinsi sebagai acuan dalam menghitung IKK diduga untuk memberikan fleksibilitas dalam penghitungan IKK apabila ada penambahan jumlah kabupaten/kota yang akan dihitung IKK-nya. Pada tahun 2013 sampai 2014 digunakan Kota Samarinda sebagai kota acuan. Tahun 2015 hingga 2017 digunakan Kota Surabaya sebagai kota acuan. Tahun 2018-2020 digunakan Kota Semarang sebagai acuan, sedangkan sejak tahun 2021 digunakan Kota Makassar sebagai kota acuan.

2.2. Paket Komoditas

Pengumpulan data harga di sektor konstruksi menggunakan pendekatan *Basket of Construction Components* (BOCC). Pendekatan ini digunakan dalam *International Comparison Programs* (ICP) tahun 2005. Metode pendekatan ini didesain untuk tujuan perbandingan antar wilayah. Dalam metode BOCC, data harga yang dikumpulkan terdiri dari komponen konstruksi utama dan input dasar yang umum dalam suatu wilayah. Komponen konstruksi merupakan output fisik konstruksi yang diproduksi sebagai tahap *intermediate* dalam proyek konstruksi. Elemen kunci dalam proses pendekatan ini yaitu semua harga yang diestimasi berhubungan dengan komponen yang dipasang, termasuk biaya material, tenaga kerja, dan peralatan dengan tujuan memberikan perbandingan harga konstruksi antar wilayah yang lebih sederhana dan biaya yang murah serta memungkinkan menggunakan metode *Bill of Quantity* (BOQ). Mengacu pada pendekatan BOCC, paket komoditas IKK didefinisikan sebagai suatu keranjang atau paket yang terdiri dari sejumlah bahan bangunan atau konstruksi yang dominan digunakan untuk membangun satu unit bangunan atau konstruksi. IKK dihitung menurut jenis kelompok barang/komoditas yang terdiri dari 5 (lima) jenis kelompok bangunan. Pengelompokan jenis bangunan yang dimaksud mengacu pada Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia (KLUI) yang terdiri dari 5 (lima) kelompok jenis bangunan yaitu bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal; prasarana pekerjaan umum untuk pertanian; jalan, jembatan, dan pelabuhan; bangunan dan instalasi listrik, gas, air minum, dan komunikasi; serta bangunan lainnya. Berikut klasifikasi dari masing masing jenis bangunan tersebut.

A. Bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal:

1. Konstruksi gedung tempat tinggal, meliputi: rumah yang dibangun sendiri, real estate, rumah susun, dan perumahan dinas.
2. Konstruksi gedung bukan tempat tinggal, meliputi: konstruksi gedung perkantoran, industri, kesehatan, pendidikan, tempat hiburan, tempat ibadah, terminal/stasiun, dan bangunan monumental.

B. Bangunan pekerjaan umum untuk pertanian:

1. Bangunan pengairan, meliputi: pembangunan waduk (*reservoir*), bendung (*weir*), embung, jaringan irigasi, pintu air, sipon dan drainase irigasi, talang, check dam, tanggul pengendali banjir, tanggul laut, krib, dan waduk.
2. Bangunan proses tempat hasil pertanian, meliputi: bangunan penggilingan dan bangunan pengeringan.

C. Bangunan pekerjaan umum untuk jalan, jembatan dan pelabuhan:

1. Bangunan jalan, jembatan, dan landasan, meliputi: pembangunan jalan, jembatan, landasan pesawat terbang, pagar/tembok, drainase jalan, marka jalan, dan rambu rambu lalu lintas.
2. Bangunan jalan dan jembatan kereta, meliputi: pembangunan jalan dan jembatan kereta.

3. Bangunan dermaga, meliputi: pembangunan, pemeliharaan, dan perbaikan dermaga/pelabuhan, sarana pelabuhan, dan penahan gelombang.

D. Bangunan untuk instalasi listrik, gas, air minum dan komunikasi: 1.

1. Bangunan elektrikal, meliputi: pembangkit tenaga listrik, transmisi, dan transmisi tegangan tinggi.
2. Konstruksi telekomunikasi udara, meliputi: konstruksi bangunan telekomunikasi dan navigasi udara, bangunan pemancar/penerima radar, dan bangunan antena.
3. Konstruksi sinyal dan telekomunikasi kereta api, meliputi: pembangunan konstruksi sinyal dan telekomunikasi kereta api.
4. Konstruksi sentral telekomunikasi, meliputi: bangunan sentral telefon/telegraf, konstruksi bangunan menara pemancar/ penerima radar microwave, dan bangunan stasiun bumi kecil/stasiun satelit.
5. Instalasi air, meliputi: instalasi air bersih dan air limbah dan saluran drainase pada gedung.
6. Instalasi listrik, meliputi: pemasangan instalasi jaringan listrik tegangan lemah dan pemasangan instalasi jaringan listrik tegangan kuat.
7. Instalasi gas, meliputi: pemasangan instalasi gas pada gedung tempat tinggal dan pemasangan instalasi gas pada gedung bukan tempat tinggal.
8. Instalasi listrik jalan, meliputi: instalasi listrik jalan raya, instalasi listrik jalan kereta api, dan instalasi listrik lapangan udara.
9. Instalasi jaringan pipa, meliputi: jaringan pipa gas, jaringan air, dan jaringan minyak.
10. Bangunan lainnya, meliputi: bangunan sipil, pembangunan lapangan olahraga, lapangan parkir, dan sarana lingkungan pemukiman.

2.3. Diagram Timbang IKK

Diagram timbang yang digunakan dalam penghitungan IKK tahun 2021 terdiri dari diagram timbang kelompok jenis bangunan dan diagram timbang IKK umum. IKK tahun 2021 menggunakan penimbang updating *Bill of Quantity* (BoQ) sampai tahun 2020. BoQ ini dikumpulkan dari masing-masing kabupaten/kota agar setiap kabupaten/kota memiliki penimbang yang sesuai dengan karakteristik pembangunan di wilayahnya masing-masing.

2.4. Dana Alokasi Umum

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan sejumlah dana yang dialokasikan kepada setiap Daerah Otonom (Provinsi/Kabupaten/Kota) di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana pembangunan. DAU merupakan salah satu komponen belanja pada APBN, dan menjadi salah satu komponen pendapatan pada APBD. Tujuan DAU salah satunya sebagai pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah Otonom dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana Alokasi Umum terdiri dari:

1. Dana Alokasi Umum untuk Daerah Provinsi.
2. Dana Alokasi Umum untuk Daerah Kabupaten/Kota.

Persentase Pembagian DAU antara Provinsi dan Kabupaten/Kota sebesar 10 persen dari total DAU Nasional dialokasikan kepada Provinsi dan 90 persen dari total DAU Nasional dialokasikan kepada Kabupaten/Kota. Perhitungan besaran DAU secara nasional yaitu minimal sebesar 26 persen dari Pendapatan Dalam Negeri Netto (PDN Netto). Setiap Provinsi/ Kabupaten/Kota menerima DAU dengan besaran yang tidak sama. Daerah dimungkinkan mendapatkan DAU lebih besar atau lebih kecil atau sama dengan DAU tahun sebelumnya. Bahkan di beberapa daerah yang memiliki Kapasitas Fiskal sangat besar dimungkinkan untuk tidak mendapat DAU (DAU = 0).

2.5. Formula Penghitungan Indeks Kemahalan Konstruksi

Penghitungan IKK 2021 dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah penghitungan nilai komponen konstruksi masing-masing sistem dari suatu bangunan untuk setiap kabupaten/kota. Nilai komponen tersebut dihitung menggunakan nilai tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

Keterangan:

$$NK_j = \sum_{k=1}^n p_k q_k$$

: Nilai komponen ke-j

P_k : Harga material/upah/sewa alat ke-k

: Kuantitas/volume material/upah/sewa ke-k

q_k : Jumlah material/upah/sewa dalam komponen ke-j

Tahap penghitungan kedua adalah menghitung *Purchasing Power Parity (PPP)* sistem dengan menggunakan metode regresi *Country Product Dummy (CPD)*. Model regresi CPD adalah sebagai berikut:

Tahap penghitungan kedua adalah menghitung *Purchasing Power Parity (PPP)* sistem dengan menggunakan metode regresi *Country Product Dummy (CPD)*. Model regresi CPD adalah sebagai berikut:

$$\ln NK_j = \alpha_i C_i + \beta_j P_j$$

Keterangan:

NK_j : Nilai komponen ke-j

C_i : Dummy kabupaten/kota ke- i

P_j : Dummy komponen ke- j dalam suatu sistem/bangunan

α_i dan β_j : Koefisien Regresi

$$PPP(\text{Purchasing Power Parity})_{\text{Sistem}_j} = \exp(\alpha_i)$$

Tahap penghitungan ketiga adalah menghitung PPP bangunan dengan menggunakan metode rata-rata geometrik tertimbang (bobot sistem) dengan rumus sebagai berikut:

$$PPP_{\text{bangunan}_i} = \prod_{i=1}^n (PPP_{\text{sistem}_i})^{w_i}$$

Keterangan:

n = Jumlah sistem dalam suatu bangunan

Tahap penghitungan keempat adalah menghitung PPP proyek dengan menggunakan metode rata-rata geometrik dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$PPP_{\text{proyek}_i} = \left(\prod_{i=1}^n (PPP_{\text{bangunan}_i}) \right)^{\frac{1}{n}}$$

Keterangan:

n = Jumlah sistem dalam suatu bangunan

Dalam menghitung PPP sistem diperlukan suatu kota acuan sebagai pembanding. Kota acuan ditetapkan berdasarkan beberapa pertimbangan, misalkan pusat distribusi barang, harga cenderung stabil, variasi harga cenderung berada di sekitar harga rata-rata nasional, dan sebagainya.

$$C_i = \text{dummy kota acuan} = 0$$

Tahap penghitungan terakhir adalah menghitung IKK kabupaten/kota dengan menggunakan metode rata-rata geometrik tertimbang (bobot APBD) dengan rumus sebagai berikut:

$$IKK_{kab/kota} = \left(\prod_{i=1}^n (PPP_{proyek_i})^{w_i} \right) \cdot 100$$

Keterangan:

n = Jumlah proyek dalam suatu kabupaten/kota

2.6. IKK 2021

IKK sudah dihitung sejak tahun 2003. Penimbang yang digunakan untuk menghitung IKK adalah BoQ tahun 2003. Saat ini material yang digunakan untuk kegiatan konstruksi sudah banyak yang berubah atau muncul model baru seperti batako ringan, atap baja ringan, kusen aluminium, dsb. Peraturan Pemerintah baik pusat maupun daerah yang mempengaruhi kegiatan konstruksi juga banyak berubah. Hal tersebut mengakibatkan BoQ 2003 yang selama ini digunakan untuk menghitung IKK tidak lagi sesuai dengan kondisi di lapangan. Oleh karena itu, mulai tahun 2013 penghitungan IKK sudah menggunakan BoQ terbaru yang dikumpulkan pada tahun 2012. Sedangkan IKK tahun 2021 menggunakan penimbang yang lebih lengkap dan *up to date* yaitu menggunakan updating BoQ tahun 2020.

IKK tahun 2021 menggunakan data harga komoditi konstruksi, sewa alat berat dan upah jasa konstruksi yang dikumpulkan dalam 4 periode pencacahan yaitu Juli 2020, Oktober 2020, Januari 2021, dan April 2021. Seperti halnya IKK sebelumnya, IKK tahun 2021 menggunakan 4 periode pencacahan dikarenakan periode tersebut mencakup masa perencanaan dan pembangunan suatu proyek konstruksi. Kota acuan yang digunakan pada tahun 2021 menggunakan Kota Makassar. Kota acuan IKK sebelumnya yaitu Kota Semarang untuk IKK 2018–2020 dan Kota Surabaya untuk IKK 2015–2017. Pemilihan kota acuan didasarkan pada wilayah yang memiliki indeks mendekati indeks rata-rata nasional dengan mempertimbangkan kelengkapan sumber data.

— ULASAN SINGKAT —

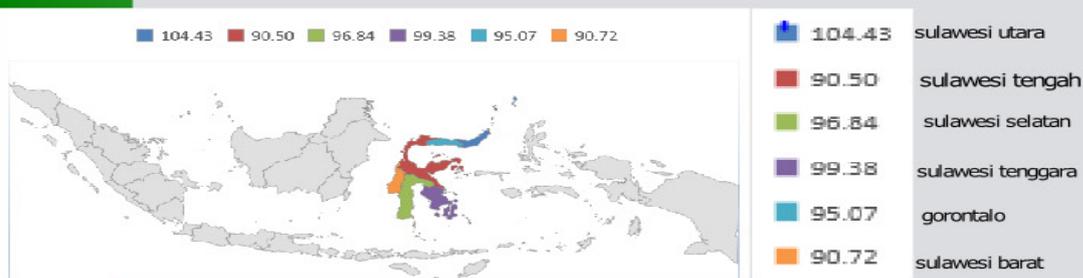


3. ULASAN SINGKAT



Indeks Kemahalan Kontruksi (IKK) merupakan indeks spesial yan menggambarkan tingkat kemahalana kontruksi di sulawesi tenggara

IKK digunakan sebagai pendekatan dalam mengukur tingkat kesulitan geografis suat daerah, yang berarti semakin sulit leta daerah tersebut maka semakin tinggi tingka harga tingkat daerah



IKK menjadi komponen penting dalam perumusan DAU, disampinf jumlah penduduk, indeks pembangunan manusia (IPM) luas wilayah, dan angka Produk Bomestik Bruto(PDRB) per kapita

3.1. Gambaran Umum Provinsi Sulawesi Tenggara

Provinsi Sulawesi Tenggara terletak di jazirah Tenggara Pulau Sulawesi. Secara astronomis terletak di bagian Selatan Garis Khatulistiwa, memanjang dari Utara ke Selatan di antara $02^{\circ}45'$ - $06^{\circ}15'$ Lintang Selatan dan membentang dari Barat ke Timur diantara $120^{\circ}45'$ - $124^{\circ}45'$ Bujur Timur.

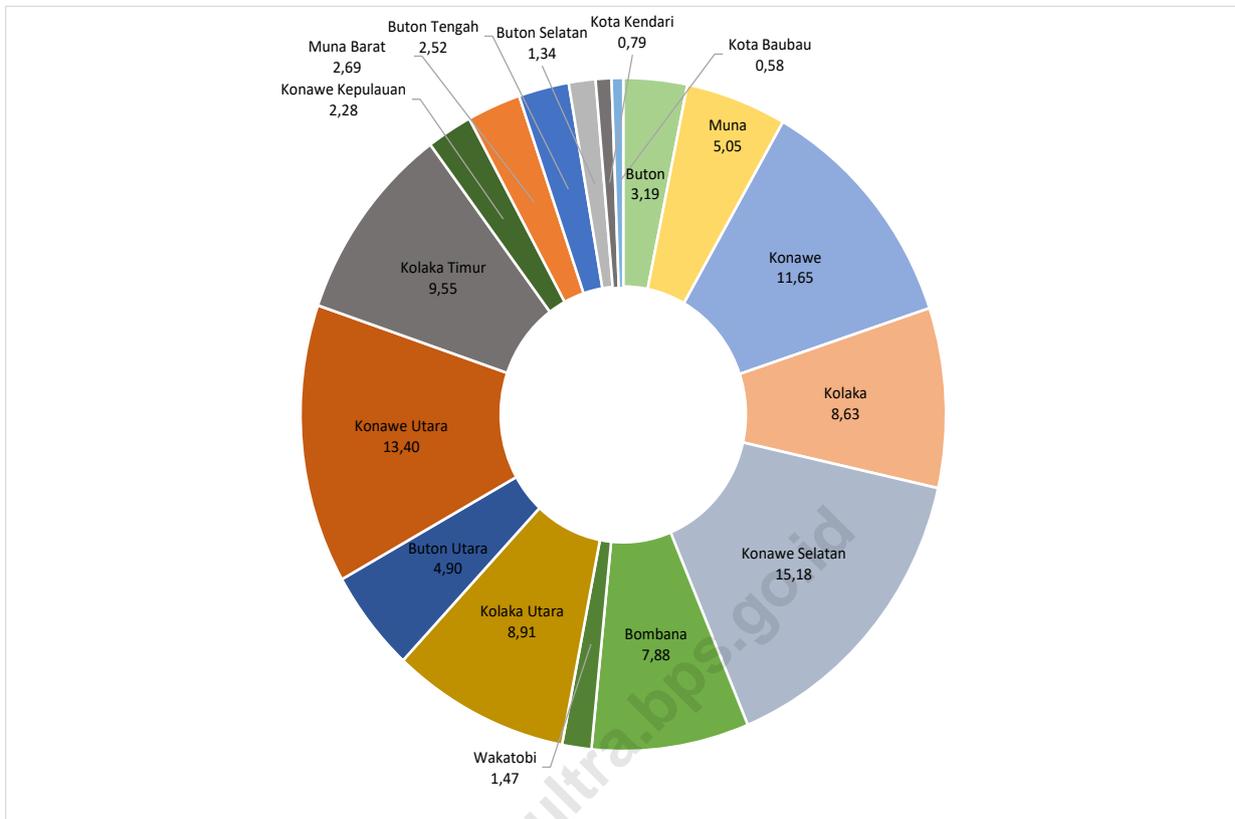
Berdasarkan posisi geografisnya, Provinsi Sulawesi Tenggara di sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Tengah, sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi NTT di Laut Flores, sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Maluku di Laut Banda dan sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Selatan di Teluk Bone. Provinsi Sulawesi Tenggara terletak di jazirah Tenggara Pulau Sulawesi. Secara astronomis terletak di bagian Selatan Garis Khatulistiwa.

Provinsi Sulawesi Tenggara ditinjau dari morfologi wilayah, merupakan gugusan daratan jazirah Sulawesi bagian tenggara dengan luas $38.067,7 \text{ km}^2$. Sedangkan wilayah perairan (laut) Sulawesi Tenggara diperkirakan seluas 110.000 km^2 (74 persen). Sebagian besar wilayah Sulawesi Tenggara memiliki permukaan tanah yang bergunung, bergelombang berbukit-bukit.

Di antara gunung dan bukit-bukit, terbentang dataran-dataran yang merupakan daerah potensial untuk pengembangan sektor pertanian, sehingga sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian dari sektor pertanian. Permukaan tanah pegunungan telah banyak digunakan untuk usaha. Tanah ini sebagian besar berada pada ketinggian 100-500 meter di atas permukaan laut dan pada kemiringan tanah yang mencapai 40 derajat.

Secara administrasi, Provinsi Sulawesi Tenggara sejak tahun 2014 hingga kini dibagi dalam lima belas wilayah Kabupaten dan dua wilayah kota. Kabupaten Konawe Selatan menjadi kabupaten/kota terluas di Sulawesi Tenggara, sedangkan Kota Baubau saat ini memiliki luasan terkecil. Adapun luas daratan masing-masing kabupaten/ kota, yaitu: Buton ($1.212,99 \text{ km}^2$), Muna ($1.922,16 \text{ km}^2$), Konawe ($4.435,28 \text{ km}^2$), Kolaka ($3.283,59 \text{ km}^2$), Konawe Selatan ($5.779,47 \text{ km}^2$), Bombana (3.001 km^2), Wakatobi ($559,54 \text{ km}^2$), Kolaka Utara ($3.391,67 \text{ km}^2$), Buton Utara ($1.864,91 \text{ km}^2$), Konawe Utara ($5.101,76 \text{ km}^2$), Kolaka Timur ($3.634,74 \text{ km}^2$), Konawe Kepulauan ($867,58 \text{ km}^2$), Muna Barat ($1.022,89 \text{ km}^2$), Buton Tengah ($958,31 \text{ km}^2$), Buton Selatan ($509,92 \text{ km}^2$), Kota Kendari ($300,89 \text{ km}^2$) dan Kota Baubau (221 km^2).

Gambar 1. Luas Daerah menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara (%), 2021



3.2. Kondisi Transportasi

Pembangunan dan peningkatan fasilitas transportasi seperti jalan dan jembatan diperlukan demi memudahkan proses mobilisasi penduduk antar daerah dan menunjang kelancaran distribusi barang dan jasa, utamanya untuk daerah-daerah sulit terjangkau. Jalan raya merupakan salah satu prasarana penting dalam transportasi darat yaitu sebagai penghubung antara sentra-sentra produksi dengan daerah pemasaran dalam rangka meningkatkan perekonomian suatu wilayah. Terkait dengan besaran harga barang dan jasa pada bidang konstruksi, selain ketersediaan barang/jasa (*supply*), hal ini dipengaruhi juga kelancaran distribusi barang/jasa (konstruksi) ke suatu wilayah. Dengan demikian kondisi jalan menjadi salah satu syarat dalam pendistribusian barang ke suatu wilayah yang pada akhirnya berpengaruh terhadap pembentukan harga barang/jasa konstruksi tersebut. Data pada akhir tahun 2021 menunjukkan panjang jalan nasional di Sulawesi Tenggara tercatat sepanjang 1.495,84 km dan jalan provinsi sepanjang 1.009,28 km. Selengkapnya tentang panjang jalan menurut Kabupaten/Kota disajikan pada Tabel 3.1 .

Tabel 3.1. Panjang Jalan Dirinci Menurut Kabupaten/Kota dan Tingkat Kewenangan Pemerintahan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Km), 2021

No	Kabupaten/Kota	Jalan Nasional	Jalan Propinsi	Jalan Kabupaten	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Buton	183,75	41,70	482,27	707,72
2	Muna	92,72	43,58	961,98	1.098,28
3	Konawe	110,42	168,59	784,48	1.063,49
4	Kolaka	183,98	17,80	876,82	1.078,60
5	Konawe Selatan	165,75	237,84	1.032,00	1.435,59
6	Bombana	145,04	0,00	790,03	935,07
7	Wakatobi	22,98	16,80	490,27	530,05
8	Kolaka Utara	205,46	50,80	496,93	753,19
9	Buton Utara	38,90	114,20	458,43	611,53
10	Konawe Utara	170,91	38,10	689,92	898,93
11	Kolaka Timur	43,10	67,90	1.036,70	1.147,70
12	Konawe Kepulauan	0,00	20,65	250,33	270,98
13	Muna Barat	39,05	14,40	517,58	571,03
14	Buton Tengah	0,00	38,60	284,96	323,56
15	Buton Selatan	0,00	64,30	302,15	366,45
16	Kendari	58,60	66,22	489,20	614,02
17	Bau-Bau	35,18	7,80	415,67	458,65
Sulawesi Tenggara		1.495,84	1.009,28	10.359,72	12.864,84

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara dan Dinas Pekerjaan Umum Kab/Kota Se-Prov Sulawesi Tenggara

Dilihat dari kondisi permukaannya, jalan dengan kondisi baik tercatat sepanjang 2.961,98 km (34,70 persen), yang tergolong kondisi sedang tercatat sepanjang 2.083,37 km (24,40 persen), kondisi rusak tercatat sepanjang 2.469,23 km (11,98 persen), dan kondisi rusak berat tercatat sepanjang 1.022,33 km (11,98 persen).

Tabel 3.2. Panjang Jalan menurut Kondisi Jalan dan Tingkat Pemerintah yang Berwenang di Sulawesi Tenggara (Km), 2021

Jenis Permukaan Jalan	Tingkat Pemerintah yang Berwenang			Jumlah
	Negara	Provinsi	Kab/Kota	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Baik	476,24	478,63	2.483,35	4389,21
2. Sedang	866,06	346,86	1.736,51	2083,37
3. Rusak	131,44	119,90	2349,29	2.469,19
4. Rusak Berat	22,10	63,89	958,44	1.022,33
Jumlah	1.495,84	1.009,28	7.527,59	9.964,10

Sumber : Diolah dari data BBPJJ Wilayah I Sultra, Dinas PU Kab/Kota se-Sultra dan Dinas PU Prov. Sultra

Selain kondisi jalan, pembentukan harga barang/jasa konstruksi juga diduga dipengaruhi oleh jarak menuju setiap kabupaten/kota serta jarak kabupaten/kota sebagai produsen/sumber barang/jasa menuju setiap lokasi pembangunan konstruksi di Sulawesi Tenggara. Akses barang masuk dari luar Provinsi Sulawesi Tenggara melalui tiga puluh pelabuhan yaitu Baubau, Jembatan Batu, Boepinang, Dongkala, Kasipute, Sikeli, Banabungi, Lasalimu – Kamaru, Talaga, Waara, Ereke, Waode Buri, Kendari, Dawi Dawi, Kolaka, Pomalaa, Tanggetada, Wolo, Tobaku, Langara, Lapuko, Torobulu, Molawe, Maligano, Raha, Tampo, Tondasi, Kaledupa, Tomia, dan Wanci. Adapun jumlah bongkar muat barang di seluruh pelabuhan tersebut pada tahun 2021 mencapai 62.287.376 ton dengan nilai bongkar sebesar 11.009.864 ton dan muat sebesar 51.277.511 ton. Dari tiga puluh pelabuhan tersebut, muat barang terbanyak tercatat di Kabupaten Konawe Utara sebanyak 21.662.201,2 ton, sedangkan bongkar barang terbanyak tercatat di Kota Baubau sebanyak 3.076.667,8 ton. (Hasil Simoppel tahun 2021).

3.3. Dana Alokasi Umum Provinsi Sulawesi Tenggara

Besaran Dana Alokasi Umum (DAU) bagi tiap daerah diduga memiliki peran penting sebagai salah satu sumber penerimaan yang akan digunakan untuk membiayai pembangunan yang dilaksanakan di daerahnya, tergantung komponen pembentuknya. Setiap Provinsi/Kabupaten/Kota menerima DAU dengan besaran yang tidak sama, serta dimungkinkan mendapatkan DAU lebih besar atau lebih kecil atau sama dengan DAU tahun sebelumnya. Besaran DAU per Kabupaten/Kota se- Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2021 disajikan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.3. Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara (Juta Rupiah), 2020

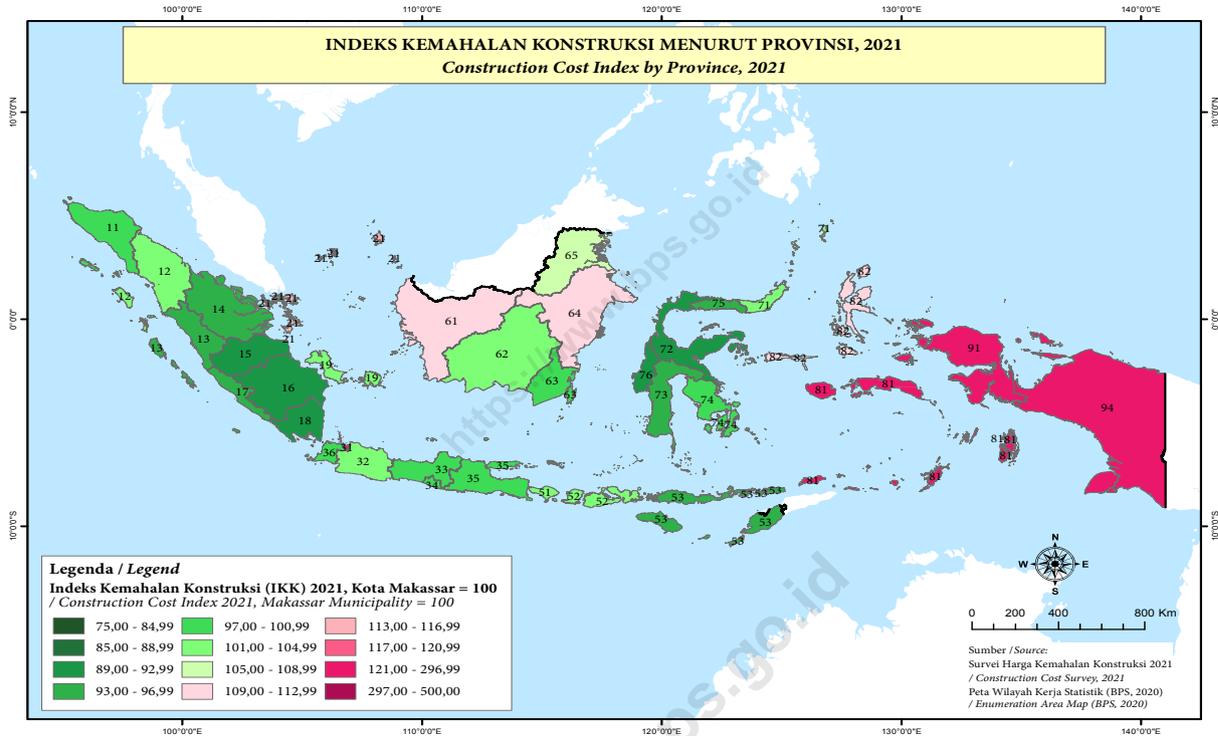
No	Kabupaten/Kota	Alokasi DAU
(1)	(2)	(3)
1	Buton	400,048,47
2	Muna	620,942,14
3	Konawe	667,195,93
4	Kolaka	550,288,50
5	Konawe Selatan	673,726,25
6	Bombana	455,101,41
7	Wakatobi	446,456,91
8	Kolaka Utara	460,597,10
9	Buton Utara	391,697,52
10	Konawe Utara	428,934,56
11	Kolaka Timur	383,189,56
12	Konawe Kepulauan	304,961,92
13	Muna Barat	338,976,56
14	Buton Tengah	342,875,04
15	Buton Selatan	336,333,93
16	Kendari	641,234,77
17	Bau-Bau	495,773,97
Sulawesi Tenggara		1,454,628,70

Kabupaten yang tercatat memperoleh DAU paling besar di Provinsi Sulawesi Tenggara adalah Kabupaten Konawe Selatan dengan DAU sebesar 673,73 miliar rupiah kemudian disusul Konawe sebesar 667,20 miliar rupiah. Sedangkan kabupaten yang tercatat memperoleh DAU paling rendah adalah Kabupaten Konawe Kepulauan dengan DAU sebesar 304,96 miliar rupiah.

3.4. Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi Sulawesi Tenggara

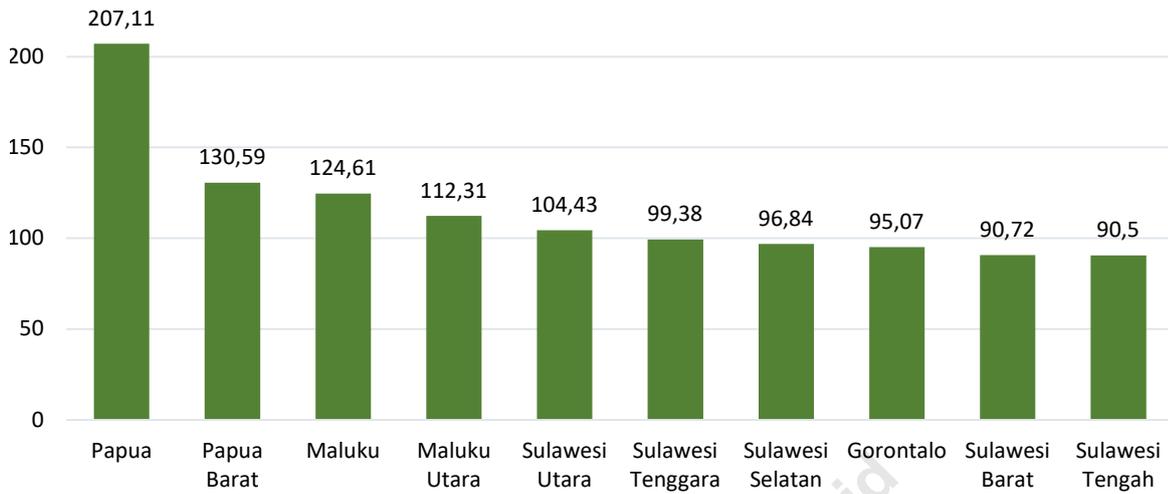
Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) yang merupakan indeks spasial digunakan untuk membandingkan tingkat harga/kemahalan bahan bangunan/jasa konstruksi di suatu daerah dengan tingkat harga/kemahalan bahan bangunan/jasa konstruksi di kota acuan. Semakin besar IKK menunjukkan semakin mahal harga bahan bangunan/konstruksi di wilayah tersebut dibandingkan dengan kota acuan. Harga bahan bangunan atau konstruksi dan harga sewa alat berat di suatu daerah diduga dipengaruhi oleh letak geografis dan kemampuan daerah tersebut dalam menyediakan bahan bangunan secara mandiri.

Gambar 2. Indeks Kemahalan Konstruksi Menurut Provinsi, 2021



Pada tahun 2021, nilai IKK Provinsi Sulawesi Tenggara tercatat sebesar 99,38. Angka ini menunjukkan bahwa tingkat kemahalan harga barang/jasa konstruksi di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara 0,62 persen lebih murah jika dibandingkan dengan Kota Makassar sebagai kota acuan. Jika dilihat dari besaran IKK-nya, rata-rata IKK di Provinsi Sulawesi Tenggara relatif lebih tinggi dibanding nilai IKK provinsi-provinsi yang berada di Pulau Sulawesi. Hal ini diduga karena jalur distribusi barang yang lebih panjang dibandingkan dengan daerah lain di pulau Sulawesi, sehingga harga barang konstruksi jadi lebih mahal, terutama barang pabrikan seperti besi, cat dll . Selain itu ada sebagian barang konstruksi yang didatangkan dari provinsi di sekitar pulau Sulawesi seperti Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah, sehingga harga barang-barang di Sulawesi Tenggara lebih mahal dibandingkan dengan harga di provinsi asal barang tersebut

Gambar 3. Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi Kawasan Sulampua, 2021



Pada tahun 2021, di tingkat provinsi, IKK tertinggi di Indonesia tercatat di Provinsi Papua sebesar 207,11 sedangkan IKK terendah tercatat di Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 90,50. Provinsi Sulawesi Tenggara secara nasional menduduki urutan ke-19 dari 34 provinsi di Indonesia. Sementara, jika dilihat menurut kawasannya, IKK Provinsi Sulawesi Tenggara menempati urutan keenam dibandingkan sepuluh provinsi yang ada di kawasan wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua (Sulampua). Sementara itu provinsi dengan IKK terendah di Kawasan Sulampua tercatat di provinsi Sulawesi Tengah dengan IKK sebesar 90,50 dan tertinggi di Papua.

Gambar 4. Peringkat Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi Sulawesi Tenggara pada Level Nasional, 2017-2021



Jika diurutkan dari nilai IKK tertinggi, pada tahun 2021 Provinsi Sulawesi Tenggara menduduki urutan ke-19 dari 34 Provinsi di Indonesia. Semakin kecil ranking IKK maka semakin besar nilai IKK suatu wilayah. Ranking IKK Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2021 lebih rendah dibanding tahun 2020. Hal ini mengisyaratkan perubahan harga barang/jasa konstruksi di Provinsi Sulawesi Tenggara relatif lebih lambat dibandingkan besaran perubahan harga di kota acuan (Kota Makassar). Karena merupakan indeks spasial, kenaikan atau penurunan nilai IKK tidak serta merta menunjukkan kenaikan/penurunan harga barang/jasa konstruksi di wilayah tersebut. Kenaikan IKK antar tahun hanya menunjukkan kecepatan kenaikan harga barang/jasa konstruksi di suatu wilayah lebih rendah dibandingkan kecepatan kenaikan harga barang/jasa konstruksi di kota acuan (Kota Makassar).

3.5. Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten/Kota

IKK dikumpulkan di 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Kabupaten/kota yang tercatat memiliki nilai IKK paling tinggi yaitu Kabupaten Puncak dengan IKK sebesar 478,12 kemudian disusul Kabupaten Intan Jaya sebesar 447,97 serta Kabupaten Puncak Jaya sebesar 446,40. Ketiga kabupaten tersebut terletak di Provinsi Papua. Nilai IKK terendah tercatat di Kabupaten Sigi (Provinsi Sulawesi Tengah) sebesar 81,71 kemudian disusul Kabupaten Belu (Provinsi Nusa Tenggara Timur) sebesar 81,46; serta Kabupaten Polewali Mandar (Provinsi Sulawesi Barat) sebesar 81,41.

Tabel 3.4. Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tenggara, 2021

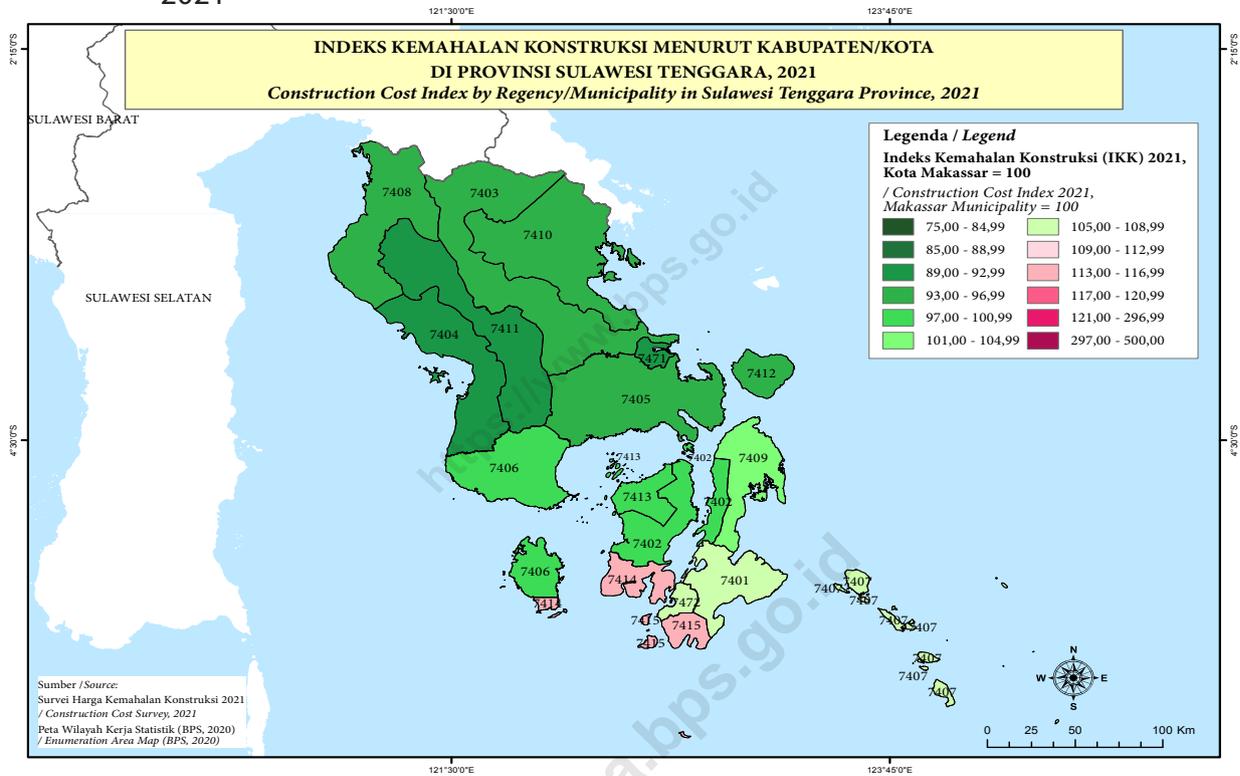
No	Kode	Kabupaten/Kota	IKK
(1)	(2)	(3)	(4)
1	7401	Buton	106,92
2	7402	Muna	99,87
3	7403	Konawe	93,92
4	7404	Kolaka	92,5
5	7405	Konawe Selatan	93,12
6	7406	Bombana	97,4
7	7407	Wakatobi	106,09
8	7408	Kolaka Utara	94,64
9	7409	Buton Utara	104,98
10	7410	Konawe Utara	94,94
11	7411	Kolaka Timur	90,77
12	7412	Konawe Kepulauan	96,41
13	7413	Muna Barat	98,18
14	7414	Buton Tengah	113,86
15	7415	Buton Selatan	115,29
16	7471	Kendari	90,06
17	7472	Bau-Bau	105,17

Dari tujuh belas Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara, kabupaten dengan IKK tertinggi pada tahun 2021 adalah Kabupaten Buton Selatan yaitu sebesar 115,29 kemudian disusul Kabupaten Buton Tengah sebesar 113,86 dan Kabupaten Buton sebesar 106,92. Sementara itu, IKK terendah tercatat di Kota Kendari sebesar 90,06.

Nilai IKK Kabupaten Buton Selatan sebesar 113,86 menunjukkan tingkat kemahalan barang/jasa konstruksi di Kabupaten Buton Selatan 13,86 persen lebih mahal dari kota acuan (Kota Makassar). Dengan kata lain, jika untuk membangun sebuah gedung di Kota Makassar dibutuhkan biaya 100 milyar rupiah, maka gedung yang sama dibangun di Kabupaten Buton Selatan akan memerlukan biaya sebesar 113,86 milyar rupiah. Barang-barang pabrikan di kabupaten yang sebagian besar dipasok oleh kabupaten di sekitarnya diduga memberi sumbangan terhadap mahalnya harga barang/jasa konstruksi di Kabupaten Buton Selatan, selain itu tingkat upah yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah lain diduga menjadi andil IKK Kabupaten Buton Selatan lebih tinggi dibanding dengan Kabupaten/Kota lainnya di Sulawesi Tenggara.

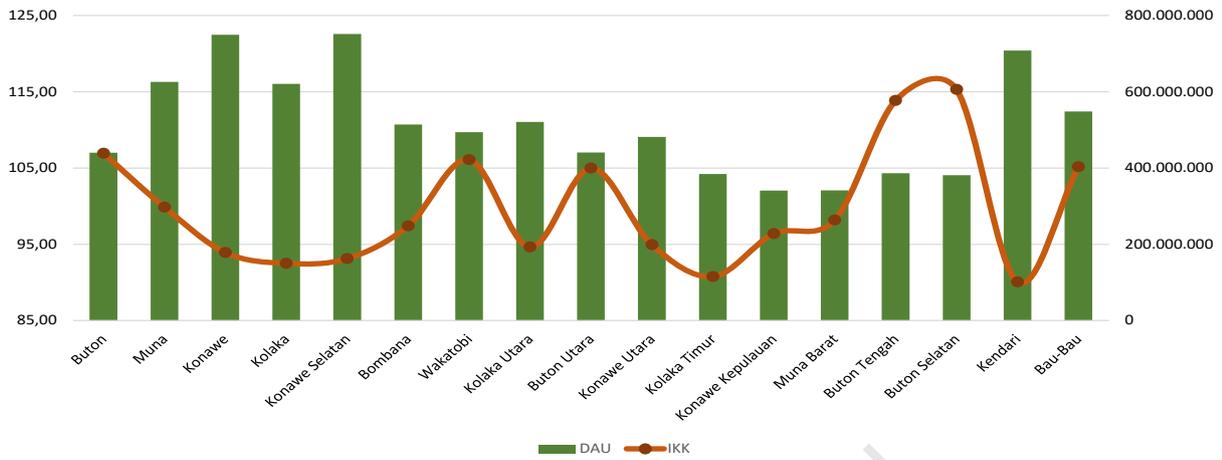
Sementara itu, nilai IKK Kota Kendari yang paling rendah di Provinsi Sulawesi Tenggara diduga dikarenakan jalur distribusi barang yang lancar, mengingat Kota Kendari adalah ibu kota provinsi Sulawesi Tenggara, dimana barang-barang konstruksi terutama barang pabrikan tersedia cukup banyak sehingga tersedia banyak pilihan bagi masyarakat, harga relatif lebih murah dibandingkan dengan kabupaten lain yang stok barangnya lebih sedikit. Hal tersebut diduga memberi sumbangan terhadap kecilnya nilai IKK Kota Kendari.

Gambar 5. Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tenggara, 2021



Seperti disampaikan pada bagian sebelumnya, IKK merupakan salah satu komponen yang diperlukan dalam penghitungan DAU. Perolehan DAU masing-masing kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara relatif sejalan dengan nilai IKKnya meski untuk beberapa kabupaten, besaran DAU juga dipengaruhi oleh luasnya wilayah dan padatnya jumlah penduduk di kabupaten tersebut. Alokasi DAU paling besar tercatat di Kabupaten Konawe Selatan yaitu sebesar 673,73 miliar rupiah. Nilai IKK Kabupaten Konawe Selatan sendiri berada pada urutan ke lima belas se-Provinsi Sulawesi Tenggara. Tingginya DAU yang diterima oleh Kabupaten Konawe Selatan dipengaruhi juga oleh status kabupaten tersebut yang merupakan kabupaten dengan terluas di Sulawesi Tenggara. Kota Kendari dengan nilai sebesar IKK 90,06 atau peringkat terakhir dari 17 kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara tercatat memperoleh DAU terbesar ketiga yaitu 641,23 miliar rupiah, hal ini dikarenakan Kota Kendari adalah wilayah dengan jumlah penduduk terbesar sdi Provinsi Sulawesi Tenggara, meskipun luas wilayah terkecil kedua di Provinsi Sulawesi Tenggara setelah Kota Baubau.

Gambar 6. Indeks Kemahalan Konstruksi dan Dana Alokasi Umum Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara, 2021



<https://sultra.bps.go.id>

— LAMPIRAN —



Tabel 1. Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi, 2017 (Kota Surabaya = 100)

No	Kode	Provinsi	IKK
(1)	(2)	(3)	(4)
1	1100	ACEH	96,41
2	1200	SUMATERA UTARA	101,49
3	1300	SUMATERA BARAT	95,33
4	1400	RIAU	94,73
5	1500	JAMBI	88,39
6	1600	SUMATERA SELATAN	98,64
7	1700	BENKULU	93,27
8	1800	LAMPUNG	90,09
9	1900	KEP. BANGKA BELITUNG	101,71
10	2100	KEP. RIAU	122,72
11	3100	DKI JAKARTA	117,57
12	3200	JAWA BARAT	96,78
13	3300	JAWA TENGAH	93,05
14	3400	DI YOGYAKARTA	92,52
15	3500	JAWA TIMUR	97,50
16	3600	BANTEN	97,88
17	5100	BALI	111,64
18	5200	NUSA TENGGARA BARAT	91,63
19	5300	NUSA TENGGARA TIMUR	95,94
20	6100	KALIMANTAN BARAT	109,12
21	6200	KALIMANTAN TENGAH	97,47
22	6300	KALIMANTAN SELATAN	101,67
23	6400	KALIMANTAN TIMUR	109,21
24	6500	KALIMANTAN UTARA	118,27
25	7100	SULAWESI UTARA	112,05
26	7200	SULAWESI TENGAH	88,13
27	7300	SULAWESI SELATAN	95,57
28	7400	SULAWESI TENGGARA	99,75
29	7500	GORONTALO	92,76
30	7600	SULAWESI BARAT	88,61
31	8100	MALUKU	121,06
32	8200	MALUKU UTARA	120,92
33	9100	PAPUA BARAT	140,04
34	9400	PAPUA	229,82

Tabel 2. Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi, 2018 (Kota Semarang = 100)

No	Kode	Provinsi	IKK
(1)	(2)	(3)	(4)
1	1100	ACEH	100,39
2	1200	SUMATERA UTARA	101,47
3	1300	SUMATERA BARAT	99,10
4	1400	RIAU	96,86
5	1500	JAMBI	92,53
6	1600	SUMATERA SELATAN	97,64
7	1700	BENGKULU	96,76
8	1800	LAMPUNG	89,31
9	1900	KEP. BANGKA BELITUNG	99,29
10	2100	KEP. RIAU	127,70
11	3100	DKI JAKARTA	109,14
12	3200	JAWA BARAT	103,63
13	3300	JAWA TENGAH	98,64
14	3400	DI YOGYAKARTA	104,88
15	3500	JAWA TIMUR	103,86
16	3600	BANTEN	100,22
17	5100	BALI	122,95
18	5200	NUSA TENGGARA BARAT	100,76
19	5300	NUSA TENGGARA TIMUR	99,79
20	6100	KALIMANTAN BARAT	113,95
21	6200	KALIMANTAN TENGAH	102,31
22	6300	KALIMANTAN SELATAN	105,09
23	6400	KALIMANTAN TIMUR	114,13
24	6500	KALIMANTAN UTARA	113,25
25	7100	SULAWESI UTARA	110,83
26	7200	SULAWESI TENGAH	97,04
27	7300	SULAWESI SELATAN	101,69
28	7400	SULAWESI TENGGARA	101,96
29	7500	GORONTALO	96,46
30	7600	SULAWESI BARAT	91,33
31	8100	MALUKU	126,39
32	8200	MALUKU UTARA	116,55
33	9100	PAPUA BARAT	134,02
34	9400	PAPUA	227,90

Tabel 3. Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi, 2019 (Kota Semarang = 100)

No	Kode	Provinsi	IKK
(1)	(2)	(3)	(4)
1	1100	ACEH	98,68
2	1200	SUMATERA UTARA	102,79
3	1300	SUMATERA BARAT	93,72
4	1400	RIAU	94,92
5	1500	JAMBI	94,38
6	1600	SUMATERA SELATAN	94,50
7	1700	BENKULU	94,74
8	1800	LAMPUNG	88,84
9	1900	KEP. BANGKA BELITUNG	101,27
10	2100	KEP. RIAU	128,34
11	3100	DKI JAKARTA	114,06
12	3200	JAWA BARAT	103,03
13	3300	JAWA TENGAH	99,93
14	3400	DI YOGYAKARTA	103,42
15	3500	JAWA TIMUR	103,68
16	3600	BANTEN	95,84
17	5100	BALI	119,10
18	5200	NUSA TENGGARA BARAT	98,76
19	5300	NUSA TENGGARA TIMUR	99,03
20	6100	KALIMANTAN BARAT	111,53
21	6200	KALIMANTAN TENGAH	101,90
22	6300	KALIMANTAN SELATAN	100,90
23	6400	KALIMANTAN TIMUR	114,37
24	6500	KALIMANTAN UTARA	112,11
25	7100	SULAWESI UTARA	108,32
26	7200	SULAWESI TENGAH	91,98
27	7300	SULAWESI SELATAN	97,34
28	7400	SULAWESI TENGGARA	101,45
29	7500	GORONTALO	97,45
30	7600	SULAWESI BARAT	92,27
31	8100	MALUKU	123,02
32	8200	MALUKU UTARA	119,11
33	9100	PAPUA BARAT	132,67
34	9400	PAPUA	218,59

Tabel 4. Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi, 2020 (Kota Semarang = 100)

No	Kode	Provinsi	IKK
(1)	(2)	(3)	(4)
1	1100	ACEH	96,38
2	1200	SUMATERA UTARA	99,84
3	1300	SUMATERA BARAT	92,96
4	1400	RIAU	95,72
5	1500	JAMBI	90,35
6	1600	SUMATERA SELATAN	92,69
7	1700	BENKULU	91,78
8	1800	LAMPUNG	88,67
9	1900	KEP. BANGKA BELITUNG	101,9
10	2100	KEP. RIAU	121,5
11	3100	DKI JAKARTA	116,84
12	3200	JAWA BARAT	103,93
13	3300	JAWA TENGAH	97,31
14	3400	DI YOGYAKARTA	102,29
15	3500	JAWA TIMUR	102,44
16	3600	BANTEN	97,05
17	5100	BALI	115,04
18	5200	NUSA TENGGARA BARAT	99,13
19	5300	NUSA TENGGARA TIMUR	97,95
20	6100	KALIMANTAN BARAT	110,92
21	6200	KALIMANTAN TENGAH	99,55
22	6300	KALIMANTAN SELATAN	100,32
23	6400	KALIMANTAN TIMUR	109,69
24	6500	KALIMANTAN UTARA	109,9
25	7100	SULAWESI UTARA	104,11
26	7200	SULAWESI TENGAH	90,74
27	7300	SULAWESI SELATAN	95,11
28	7400	SULAWESI TENGGARA	101,09
29	7500	GORONTALO	94,12
30	7600	SULAWESI BARAT	89,48
31	8100	MALUKU	124,38
32	8200	MALUKU UTARA	120,52
33	9100	PAPUA BARAT	129,66
34	9400	PAPUA	208,90

Tabel 5. Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi, 2021 (Kota Makassar = 100)

No	Kode	Provinsi	IKK
(1)	(2)	(3)	(4)
1	1100	ACEH	99,03
2	1200	SUMATERA UTARA	101,63
3	1300	SUMATERA BARAT	94,77
4	1400	RIAU	94,85
5	1500	JAMBI	92,76
6	1600	SUMATERA SELATAN	91,58
7	1700	BENGGULU	94,42
8	1800	LAMPUNG	92,57
9	1900	KEP. BANGKA BELITUNG	101,21
10	2100	KEP. RIAU	116,8
11	3100	DKI JAKARTA	121,42
12	3200	JAWA BARAT	102,6
13	3300	JAWA TENGAH	97,65
14	3400	DI YOGYAKARTA	100,31
15	3500	JAWA TIMUR	100,8
16	3600	BANTEN	97,64
17	5100	BALI	103,17
18	5200	NUSA TENGGARA BARAT	101,93
19	5300	NUSA TENGGARA TIMUR	93,58
20	6100	KALIMANTAN BARAT	111,45
21	6200	KALIMANTAN TENGAH	101,47
22	6300	KALIMANTAN SELATAN	99,25
23	6400	KALIMANTAN TIMUR	109,81
24	6500	KALIMANTAN UTARA	106
25	7100	SULAWESI UTARA	104,43
26	7200	SULAWESI TENGAH	90,5
27	7300	SULAWESI SELATAN	96,84
28	7400	SULAWESI TENGGARA	99,38
29	7500	GORONTALO	95,07
30	7600	SULAWESI BARAT	90,72
31	8100	MALUKU	124,61
32	8200	MALUKU UTARA	112,31
33	9100	PAPUA BARAT	130,59
34	9400	PAPUA	207,11

Tabel 6. Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tenggara, 2017 (Kota Surabaya = 100)

No	Kode	Kabupaten/Kota	IKK
(1)	(2)	(3)	(4)
1	7401	Buton	97,23
2	7402	Muna	101,93
3	7403	Konawe	96,83
4	7404	Kolaka	91,30
5	7405	Konawe Selatan	91,12
6	7406	Bombana	96,52
7	7407	Wakatobi	109,58
8	7408	Kolaka Utara	101,42
9	7409	Buton Utara	114,33
10	7410	Konawe Utara	88,93
11	7411	Kolaka Timur	91,53
12	7412	Konawe Kepulauan	106,15
13	7413	Muna Barat	105,68
14	7414	Buton Tengah	106,29
15	7415	Buton Selatan	103,16
16	7471	Kendari	92,65
17	7472	Bau-Bau	105,47

Tabel 7. Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tenggara, 2018 (Kota Semarang = 100)

No	Kode	Kabupaten/Kota	IKK
(1)	(2)	(3)	(4)
1	7401	Buton	105,06
2	7402	Muna	102,86
3	7403	Konawe	97,92
4	7404	Kolaka	95,67
5	7405	Konawe Selatan	95,12
6	7406	Bombana	98,43
7	7407	Wakatobi	108,48
8	7408	Kolaka Utara	103,97
9	7409	Buton Utara	109,09
10	7410	Konawe Utara	98,64
11	7411	Kolaka Timur	90,93
12	7412	Konawe Kepulauan	107,09
13	7413	Muna Barat	108,97
14	7414	Buton Tengah	105,42
15	7415	Buton Selatan	108,61
16	7471	Kendari	93,03
17	7472	Bau-Bau	107,00

Tabel 8. Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tenggara, 2019 (Kota Semarang = 100)

No	Kode	Kabupaten/Kota	IKK
(1)	(2)	(3)	(4)
1	7401	Buton	104,05
2	7402	Muna	103,54
3	7403	Konawe	100,10
4	7404	Kolaka	93,89
5	7405	Konawe Selatan	94,97
6	7406	Bombana	96,55
7	7407	Wakatobi	106,13
8	7408	Kolaka Utara	99,33
9	7409	Buton Utara	110,32
10	7410	Konawe Utara	100,48
11	7411	Kolaka Timur	92,38
12	7412	Konawe Kepulauan	104,97
13	7413	Muna Barat	107,49
14	7414	Buton Tengah	105,60
15	7415	Buton Selatan	110,55
16	7471	Kendari	91,45
17	7472	Bau-Bau	105,76

Tabel 9. Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tenggara, 2020 (Kota Semarang = 100)

No	Kode	Kabupaten/Kota	IKK
(1)	(2)	(3)	(4)
1	7401	Buton	106,17
2	7402	Muna	105,55
3	7403	Konawe	97,10
4	7404	Kolaka	93,71
5	7405	Konawe Selatan	92,50
6	7406	Bombana	96,63
7	7407	Wakatobi	108,17
8	7408	Kolaka Utara	97,79
9	7409	Buton Utara	108,82
10	7410	Konawe Utara	96,94
11	7411	Kolaka Timur	90,86
12	7412	Konawe Kepulauan	101,54
13	7413	Muna Barat	109,05
14	7414	Buton Tengah	107,46
15	7415	Buton Selatan	113,02
16	7471	Kendari	90,25
17	7472	Bau-Bau	107,25

Tabel 10. Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tenggara, 2021 (Kota Makassar = 100)

No	Kode	Kabupaten/Kota	IKK
(1)	(2)	(3)	(4)
1	7401	Buton	106,92
2	7402	Muna	99,87
3	7403	Konawe	93,92
4	7404	Kolaka	92,5
5	7405	Konawe Selatan	93,12
6	7406	Bombana	97,4
7	7407	Wakatobi	106,09
8	7408	Kolaka Utara	94,64
9	7409	Buton Utara	104,98
10	7410	Konawe Utara	94,94
11	7411	Kolaka Timur	90,77
12	7412	Konawe Kepulauan	96,41
13	7413	Muna Barat	98,18
14	7414	Buton Tengah	113,86
15	7415	Buton Selatan	115,29
16	7471	Kendari	90,06
17	7472	Bau-Bau	105,17



DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

Jl. Boulevard No. 1 Kendari, Sulawesi Tenggara
Telp. (0401) 3135363 Fax. (0401) 3122355
E-mail : bps7400@bps.go.id

ISBN 978-602-5407-54-3

